





TRIBUN JOGJA/MIFTAHUL HUDA

**UNJUK RASA** - Para pedagang Teras Malioboro 2 beraksi menyampaikan kekecewaannya, Rabu (17/7).

## PKL Teras Malioboro 2 Ingin Relokasi Berjalan Transparan

**YOGYA, TRIBUN** - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Teras Malioboro 2 Yogyakarta kembali menyampaikan kegelisahannya terkait rencana relokasi ke kawasan Ketandan dan Beskalan. Mereka meminta relokasi berjalan transparan.

Para pedagang menyampaikan aspirasinya di depan Teras Malioboro, Rabu (17/7) sembari membentangkan sejumlah poster bertuliskan kalimat kekecewaan. Mereka juga membentangkan spanduk panjang bertuliskan Petisi untuk Kesejahteraan PKL.

Dalam spanduk itu turut dibubuhkan puluhan tanda tangan para PKL Malioboro yang merasa kecewa atas rencana relokasi dari Pemerintah DIY. Mayoritas pedagang yang kecewa dengan proses relokasi itu tergabung dalam koperasi dan paguyuban Tri Dharma dibawah kepemimpinan baru.

Ketua Koperasi Tri Dharma, Arif Usman, mengatakan pihaknya menginginkan relokasi pedagang yang partisipatif, transparan, dan berpengaruh pada perekonomian. Aksi damai ini menurut Arif Usman sudah dilakukan PKL Teras Malioboro 2 sejak 5 Juli 2023 silam.

"Jadi kami sudah berjuang sejak 5 Juli tahun lalu. Tuntutannya sama, tapi tidak ada kemajuan sama sekali," katanya, kepada awak media.

Arif merasa para pedagang tidak pernah dilibatkan dalam membahas rencana relokasi. Dia mengklaim pemerintah hanya melibatkan orang-orang tertentu yang dirasa bukan mewakili kepentingan pedagang.

"Selama proses tidak ada partisipasi sama sekali dari pedagang," jelasnya.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati menyampaikan kekecewaan yang sama. Perempuan yang biasa disapa Upik ini mengeluhkan semestinya pemerintah membuka ruang dialog dan diskusi bersama.

Ia juga menyinggung dugaan aksi represif yang dilakukan oleh aparat keamanan UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro pada aksi damai Sabtu (13/7) lalu. "Petugas UPT yang seharusnya humanis, tapi malah akan-akan memberikan kekerasan kepada kami. Dengan cara penutupan gerbang selama tiga jam lebih, kemudian juga ada pemadaman listrik, saya harapkan insiden kemarin tidak terulang lagi," ungkapnya.

Terkait pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menyampaikan adanya kontrak person to person dengan para pedagang untuk keperluan relokasi, menurutnya selama ini para pedagang tidak mendapat surat perjanjian apapun.

"Pedagang Teras Malioboro belum pernah menandatangani kontrak atau surat perjanjian antara pihak pertama pemerintah dan pihak kedua pedagang. Yang pernah dilakukan pemerintah, UPT Cagar Budaya, yaitu validasi data. Hanya pencocokan," kata Upik. (hda)

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005